

BAB 5

KESIMPULAN

Memang tak bisa dipungkiri bahwa ODA Jepang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia dan peningkatan sejumlah sektor di Indonesia, salah satunya ialah pendidikan dengan cara pemberian beasiswa. Selain itu pula, bantuan untuk sejumlah peristiwa bencana alam juga bisa menjadi bukti bagi kontribusi ODA di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi persoalannya ialah bahwa contoh-contoh tersebut hanyalah merupakan contoh yang kecil ketimbang contoh ODA itu sendiri secara keseluruhan. Program-program tersebut jika dibandingkan dengan keseluruhan program yang ada dalam setiap penyaluran ODA umumnya tidak signifikan besarnya. ODA Jepang, secara keseluruhan, lebih banyak disalurkan kepada sektor-sektor non-sosial, seperti infrastruktur (yang cenderung berkaitan dengan kegiatan ekonomi-makro dan investasi), energi, telekomunikasi dan sejumlah sektor lainnya, yang efeknya cenderung lebih dirasakan oleh sektor industrial ketimbang sektor publik.

Selain itu pula, dominasi ODA tipe utang juga dapat membuktikan 'ketidak-baikannya' ODA Jepang. Padahal menurut aturan OECD yang ada, ODA haruslah mayoritasnya terdiri dari unsur hibah bukannya utang. Hibah berarti bahwa setiap bantuan yang diberikan kepada sebuah negara, tidak diharapkan pengembaliannya kembali oleh negara yang memberikannya (pendonor). Perbedaan yang begitu besar antara ODA tipe pinjaman dengan tipe hibah bisa dikatakan cukup besar. Hal ini kemudian semakin menguatkan argumen bahwa ODA Jepang tidak semata-mata hanya bertujuan kemanusiaan saja.

Kemudian yang menjadi kritik atas ODA Jepang terletak pada sistem formulasi kebijakan yang melibatkan banyak pihak. Pelibatan banyak pihak cenderung mengakibatkan pelibatan banyak-kepentingan pula. Apalagi seperti yang telah dipaparkan pada bab 3 bahwa tiap-tiap aktor utama ODA umumnya memiliki *patron*, terutama yang berasal dari kelompok swasta (bisnis). Hal ini mengakibatkan institusi tersebut (aktor-utama ODA) cenderung untuk membawa

'aspirasi' dan kepentingan dari *parton* yang dibawahinya. Pelibatan kelompok swasta (bisnis) dalam mekanisme ODA tentunya mengakibatkan tujuan ODA yang ada menjadi tidak 'murni' lagi bersifat bantuan.

Dalam implementasinya di Indonesia, ODA seringkali digunakan untuk meningkatkan dan mengamankan kepentingan Jepang di Indonesia, yang dilakukan dengan cara memperkuat hubungan-ekonomi asimetris antara Jepang dengan Indonesia. Terdapat tiga cara yang menjadi jalur bagi ODA untuk menguatkan kondisi tersebut, yakni: *Pertama*, melalui ODA itu sendiri. Dengan cara memanfaatkan unsur-unsur yang terdapat dalam ODA-nya, pemerintah Jepang dapat menciptakan dan bahkan memperkuat hubungan-ekonomi yang tidak seimbang tersebut. Utang merupakan salah satunya, dan bahkan menjadi 'pemain' yang penting dalam upaya tersebut. Jepang melalui program pinjaman luar-negerinya membuat Indonesia menjadi tergantung kepadanya. Dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang memerlukan dana yang tidak sedikit dalam membangun negaranya, menjadi salah satu alasan mudahnya Indonesia tergantung kepada pinjaman Jepang. Selain itu pula, kondisi perekonomian Indonesia yang bisa dikatakan belum pulih pasca krisis, menjadi faktor pendorong pula bagi tergantungnya Indonesia terhadap bantuan finansial Jepang. Hal ini tentunya memberikan efek negatif bagi Indonesia itu sendiri, yakni melemahkan posisi Indonesia di hadapan Jepang, serta melambatnya pembangunan yang ada. Hutang membuat alokasi dana yang ada sebageian besar jatuh kepada pembayarannya, dan mengorbankan aspek-aspek lainnya yang pada dasarnya vital bagi negara, sebagai contohnya ialah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sedangkan untuk kasus hibah dan kerjasama teknis, bentuk hubungan asimetrisnya terletak pada melemahnya kemandirian nasional dan besarnya ketergantungan Indonesia atas 'bantuan' (hibah dan kerjasama) Jepang.

Kedua, melalui investasi dan perdagangan. ODA bisa dikatakan sebagai 'jalan' bagi peningkatan investasi dan perdagangan di Indonesia. Seperti yang dikatakan di awal bab ini, bahwa mayoritas dari program-program ODA yang ada di Indonesia, umumnya disalurkan kepada sektor-sektor yang erat kaitannya dengan industri dan investasi. Selain bermanfaat bagi investasi yang akan masuk

(karena bisa menurunkan biaya investasi yang ada), ODA juga bermanfaat dalam mengamankan dan meningkatkan produktivitas industri yang telah ada di Indonesia sebelumnya. Investasi yang sudah masuk tersebut kemudian akan berproduksi sama halnya dengan perusahaan Jepang lainnya yang telah ada lebih dulu. Hasil produk ini tentunya ada yang akan dijual di pasar lokal—umumnya barang-barang jadi—, dan ada pula yang akan diekspor ke Jepang kembali—biasanya ialah barang mentah dan komoditas energi. Hubungan-ekonomi yang asimetris terjadi manakala komoditas-komoditas Jepang di Indonesia menguasai pasaran Indonesia (bukan hanya mengalahkan komoditas negara lainnya, tetapi juga komoditas dari industri lokal). Hal ini kemudian menyebabkan Indonesia untuk kembali tergantung kepada produktivitas perusahaan Jepang. Selain itu pula, untuk kasus komoditas yang diekspor kembali ke Jepang pada dasarnya secara jangka panjang merugikan Indonesia. Sebagai contohnya ialah ekspor LNG, yang serinkali tidak mendahulukan kebutuhan domestik.

Serta *ketiga*, dalam pembentukan perjanjian kemitraan antara Indonesia dengan Jepang. EPA memberikan keuntungan lebih kepada Jepang, karena melalui cara ini Jepang dapat mengontrol, meningkatkan serta mengamankan kepentingan ekonominya yang tercermin melalui tiga unsur yang ada, yakni investasi, perdagangan, serta keamanan energi. EPA bisa dikatakan sebagai produk akhir dari usaha kepentingan Jepang di Indonesia untuk saat ini. Dalam EPA itu sendiri hubungan-ekonomi yang tidak seimbang antara Jepang dengan Indonesia jelaslah terlihat. Sebagai contohnya ialah pembukaan pasar, yang kemudian menyebabkan ‘banjir-nya’ produk Jepang di pasar Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa ODA, baik secara langsung ataupun tidak langsung, menjadi alat yang memperkuat hubungan-ekonomi yang tidak setara antara Jepang dengan Indonesia. Hal ini juga mungkin sesuai dengan ilustrasi ‘apa yang Jepang dapatkan pada tangan kiri lebih besar ketimbang apa yang Jepang berikan pada tangan kanan’ yang menggambarkan bahwa dalam setiap penyaluran ODA oleh Jepang yang selalu membawa pemenuhan kepentingan ekonomi Jepang. Singkatnya bantuan luar negeri (seperti hutang), investasi, dan liberalisasi perdagangan bukan hanya menguntungkan negara maju

yang menjual produk hasil olahan teknologi yang menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, tetapi juga 'memaku' posisi negara berkembang untuk tetap menjadi sumber bahan mentah, tenaga kerja murah, dan juga pasar bagi produk negara-negara maju.